

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

DPR memiliki kewenangan tentang pengawasan terhadap eksekutif namun ada kendala-kendala seperti kendala politik, kendala hukum, kendala institusional, kendala informasi, kendala waktu, independen dan transparan. Adapun keterbatasan pengawasan terhadap eksekutif adalah kekuasaan terpusat, kurangnya transparansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh politik, dan kurangnya penegakan hukum. Sedangkan sistem pengawasan parlemen yang ideal untuk konstitusi Indonesia adalah;

1. Legislatif harus memiliki kekuasaan yang memadai untuk mengawasi eksekutif, termasuk kemampuan untuk mengajukan interpelasi, angket, dan menyetujui atau menolak anggaran.
2. Eksekutif harus diwajibkan untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada publik dan badan pengawas. Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan keterbukaan informasi publik dan pelaporan rutin.
3. Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam pengawasan eksekutif harus didorong. Mekanisme pelaporan publik dan pengaduan masyarakat harus diperkuat.
4. Badan pengawas harus dilengkapi dengan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran, tenaga kerja, maupun keahlian teknis untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

## 4.2 Saran

1. Disarankan untuk mempertimbangkan penguatan peran Komisi-Komisi di DPR dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Penetapan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur dan intensif dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Perlu adanya program pelatihan dan pendidikan kontinu bagi anggota DPR untuk memperluas pemahaman mereka tentang kebijakan eksekutif dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mempertimbangkan dan mengevaluasi kebijakan eksekutif dengan lebih cermat.
3. Menyarankan untuk melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki sistem presidensial serupa, seperti Amerika Serikat atau Brasil, untuk mengeksplorasi praktik terbaik dalam pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan untuk memperkaya pemahaman terhadap konteks Indonesia
4. Mengajukan saran untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dan kelompok advokasi dalam memantau dan mengawasi kebijakan eksekutif. Keterlibatan mereka dapat berperan sebagai kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja pemerintah.